



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT NO. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Analisis Faktor Eksternal dan Faktor Internal yang  
Mempengaruhi Pemerintah Indonesia dalam  
Memberikan Bantuan Kepada Pengungsi Rohingya  
Tahun 2015-2018**

Skripsi

Oleh

Octavanya Triverany

6091901141

Bandung

2023



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT NO. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Analisis Faktor Eksternal dan Faktor Internal yang  
Mempengaruhi Pemerintah Indonesia dalam  
Memberikan Bantuan Kepada Pengungsi Rohingya  
Tahun 2015-2018**

Skripsi

Oleh

Octavanya Triverany

6091901141

Pembimbing

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han)

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



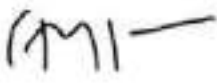
**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Octavanya Triverany  
Nomor Pokok : 6091901141  
Judul : Analisis Faktor Eksternal dan Faktor Internal yang Mempengaruhi Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Bantuan Kepada Pengungsi Rohingya Tahun 2015-2018

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 30 Juni 2023  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**  
Angguntari Ceria Sari, S.IP., M.Sc.

:   
\_\_\_\_\_

**Sekretaris**

Vrameswari Omegawati, S.IP., M.Si(Han)

:   
\_\_\_\_\_

**Anggota**

Putu Agung Nara Indra Prima Satya, S.IP., M.Sc

:   
\_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## DAFTAR PERBAIKAN NASKAH SKRIPSI

Nama : Octavanya Triverany  
Nomor Pokok Mahasiswa : 6091901141  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Pembimbing : Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han) (20170028) Pembimbing Tunggal  
Hari dan tanggal ujian skripsi : Jumat tanggal 30 June 2023  
Judul (Bahasa Indonesia) : Analisis Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Bantuan kepada Pengungsi Rohingya Tahun 2015-2018  
Judul (Bahasa Inggris) : Analysis of External and Internal Factors Affecting the Indonesian Government in Providing Aid to Rohingya Refugees in 2015-2018

### 1. Perbaikan Judul Skripsi menjadi (**Judul harus ditulis lengkap menggunakan huruf besar kecil/Title Case**)

Judul (Bahasa Indonesia)

Judul (Bahasa Inggris)

### 2. Perbaikan Umum (meliputi : cara merujuk, daftar pustaka, teknis editing) :

Cantumkan temuan di abstrak.  
Upayakan jangan fimela sumbernya.

### 3. Perbaikan di Bab 1

1. Perjelas apakah negara yang tidak tanda tangan konvensi internasional apapun tidak bisa lantas melakukan hal positif? Apakah ada ketentuan yang mengatakan kalau tidak tanda tangan perjanjian internasional tidak bisa berkontribusi positif? Bisa cek praktik di isu lain, apakah misal negara tidak ttd protocol Kyoto lantas tidak peduli lingkungan? Jawaban atas pertanyaan ini juga tergantung sebenarnya apa tujuan atau kenapa negara ttd konvensi internasional? Kalau misal karena takut tidak siap komit resource, berarti tidak ada yang menghalangi negara melakukan kontribusi positif tanpa ada ttd konvensi internasional. Tambahkan penjelasan ini di bab 1.  
2. Informasi di halaman 9 itu apa tujuannya ya? Nulis daftar regulasi domestic mau kasih tau kalau Indonesia berbuat sesuatu tanpa ada ttd konvensi?  
3. KP: ada 3 faktor domestic, media, opini, dan identitas. Itu secara teori keterkaitannya seperti apa? Faktor mana yang membentuk apa? Apakah media membentuk atau menggiring opini? Atau Opini public ditangkap oleh media dan dari sini mempengaruhi kebijakan pemerintah? Lalu gimana dengan peran identitas dalam interaksi ketiga faktor ini dalam Menyusun kebijakan luar negeri? Di KP perlu diperjelas apa ukuran opini? Mengukurinya gimana opini sentiment empati, positif, negative, atau opini seperti tekanan ke pemerintah?  
4. Tolong perjelas apa inti dari konvensi pengungsi (2-3 kalimat). Apakah juga isi konvensi ini mengindikasikan bahwa kalau tidak tandan tangan, negara tidak bisa kontribusi positif? Karena dari tahun 1960 an Indonesia suka bantu pengungsi.

### 4. Perbaikan di Bab 2

1. terkait aktor transnasional, apa dasar dari pemelihan aktor-aktor ini? Apakah PBB dan IOM menekan Indonesia untuk membantu pengungsi dari Rohingya? Peran apa yang mereka lakukan di sini? Proses interaksi IO /eksternal dengan Indonesia tambahkan juga di KP.

### 5. Perbaikan di Bab 3

2. Jelaskan faktor apa diantara semua itu yang berperan? apakah mediana? eksternal? Jelaskan. Skripsi ini belum jelas seberapa besar peran domestik dibanding peran eksternal.

### 6. Perbaikan di Bab 4

### 7. Perbaikan di Bab 5

**DOKUMEN INI TIDAK PERLU DITANDATANGANI LAGI**

Bandung, 30 June 2023

Ketua Program Studi,

Penguji (Pembimbing),

kaprodi\_hi.fisip@unpar.ac.id  
6/30/2023 10:55:59

vrameswariomega@unpar.ac.id  
6/30/2023 10:43:01

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han)

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han)

Penguji,

angguntari@unpar.ac.id  
6/30/2023 10:42:48

Angguntari Ceria Sari, S.IP., M.Sc.

Penguji,

naraindra.prima@unpar.ac.id  
6/30/2023 10:43:07

[Putu Agung Nara Indra Prima Satya, S.IP., M.Sc](#)

## TABEL REVISI SIDANG

<b>Letak/Halaman</b>	<b>Usulan/Masukan</b>	<b>Revisi</b>
<b>Cover</b>	Perbaiki judul skripsi	<p>Analisis Faktor Eksternal dan Faktor Internal yang Mempengaruhi Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Bantuan Kepada Pengungsi Rohingya Tahun 2015-2018</p> <p>Analysis of External Factors and Internal Factors Affecting the Indonesian Government in Providing Aid to Rohingya Refugees in 2015-2018</p>
<b>Abstrak</b>	Mencantumkan temuan	<p>Dari penelitian tersebut, penulis menemukan bahwa terdapat keterlibatan faktor eksternal dan faktor internal yang dapat mendorong Indonesia untuk melakukan berbagai upaya dan pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan isu pengungsi Rohingya. Upaya yang Indonesia lakukan dapat berupa kerjasama dengan aktor transnasional dan negara-negara yang terlibat. Tidak hanya itu, penulis juga menemukan bahwa terhadap penanganan yang pemerintah Indonesia lakukan di ranah domestik mengenai dampak dari penolakan kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia.</p>

<p><b>Abstract</b></p>	<p>Mencantumkan temuan</p>	<p>From this research, the author found that there is an involvement of external factors and internal factors that can encourage Indonesia to make various efforts and approaches to solve the Rohingya refugee issue. The efforts that Indonesia makes can be in the form of cooperation with transnational actors and the countries involved. Not only that, the author also found that the handling that the Indonesian government did in the domestic sphere regarding the impact of the rejection of the arrival of Rohingya refugees in Indonesia.</p>
<p><b>BAB 1</b> (Identifikasi Masalah) <b>Halaman 3-4</b></p>	<p>Perjelas apakah negara yang tidak tanda tangan konvensi internasional apapun tidak dapat melakukan hal-hal positif? Apakah terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa jika tidak menandatangani perjanjian internasional, maka aktor tersebut tidak dapat berkontribusi?</p>	<p>Terlepas dari penolakan kedatangan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia. Indonesia tetap berusaha untuk memberikan kebutuhan seperti makanan, minuman, akses kesehatan, dan kebutuhan penting lainnya. Tidak hanya itu, Indonesia juga memberikan tempat tinggal sementara dan Masjid untuk melaksanakan ibadah. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia tidak semena-mena menolak kehadiran pengungsi Rohingya. Pemerintah Indonesia masih menjalankan tugasnya sebagai negara yang mengedepankan kemanusiaan dengan bantuan tersebut. Namun Indonesia tidak bisa terus bersikap setengah-setengah terhadap kedatangan pengungsi dikarenakan tekanan dan dorongan dari ranah domestik dan internasional. Tekanan dan dorongan ini membuat Indonesia seolah-olah perlu bertanggung jawab atas permasalahan isu pengungsi Rohingya. Maka dari itu, pemerintah Indonesia</p>

		<p>perlu mendiskusikan dan merancang kembali kebijakannya mengenai kedatangan pengungsi etnis Rohingya dan melakukan berbagai pendekatan untuk menyelesaikan isu pengungsi Rohingya secara luas.</p>
<p><b>BAB 1</b> (Kajian Literatur) <b>Halaman 9</b></p>	<p>Tulis alasan mengenai pertanyaan regulasi domestik di halaman 9.</p>	<p>Kehadiran regulasi ini memperlihatkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi di negaranya. Regulasi ini dibantu oleh kerjasama antara pemerintah dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), saat terjadi aksi penolakan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia pada tahun 2015.</p>
<p><b>BAB 1</b> (Kerangka Pemikiran) <b>Halaman 15-16</b></p>	<p>Keterkaitan mengenai poin - poin dalam faktor internal (<i>internal determinants</i>).</p>	<p>Opini → Kelompok Kepentingan:  <p style="padding-left: 40px;">Jika kita lihat sebelumnya, Indonesia juga menjadi negara kedatangan dari pengungsi asal Rohingya, namun Indonesia tidak menjadi negara penandatanganan dari Perjanjian Konvensi 1951. Hal tersebut menjelaskan bahwa seharusnya Indonesia tidak memiliki tanggung jawab atas kedatangan pengungsi.</p> <p>Media → opini dan kelompok:  Peran media juga berhubungan dengan faktor-faktor sebelumnya, karena media dapat mempengaruhi opini publik mengenai suatu permasalahan, terlebih lagi, media seringkali dianggap sebagai telinga dan mata di pemerintahan.</p> </p>
<p><b>BAB 1</b> (Identifikasi Masalah)</p>	<p>Perjelas inti dari konvensi pengungsi (2-3 kalimat). Apakah</p>	<p>Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951 adalah konvensi mengenai perlindungan terhadap pengungsi. Dimana setiap negara yang telah</p>



<p><b>Halaman 3-4</b></p>	<p>dengan tidak menandatangani konvensi tersebut, maka suatu negara tidak dapat memberikan bantuan?</p>	<p>menandatangani persetujuan konvensi 1951, harus menerima kedatangan pengungsi dan bertugas untuk melindunginya di dalam negaranya. Jika kita lihat sebelumnya, Indonesia juga menjadi negara kedatangan dari pengungsi asal Rohingya, namun Indonesia tidak menjadi negara penandatangan dari Perjanjian Konvensi 1951. Hal tersebut menjelaskan bahwa seharusnya Indonesia tidak memiliki tanggung jawab atas kedatangan pengungsi.</p> <p>Terlepas dari penolakan kedatangan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia. Indonesia tetap berusaha untuk memberikan kebutuhan seperti makanan, minuman, akses kesehatan, dan kebutuhan penting lainnya. Tidak hanya itu, Indonesia juga memberikan tempat tinggal sementara dan Masjid untuk melaksanakan ibadah.</p>
<p><b>BAB 1</b> (Kerangka Pemikiran) <b>Halaman 13-14</b></p>	<p>Proses interaksi Organisasi Internasional dalam aktor transnasional</p>	<p>Hill memaparkan bahwa terdapat tiga hubungan antara aktor transnasional dengan negara, yaitu, <i>normal</i>, <i>competitive</i>, dan <i>parallel</i>. Dalam penelitian ini, hubungan yang terlihat antara transnasional aktor dengan negara adalah hubungan <i>competitive</i>. Hubungan tersebut menjelaskan bahwa aktor transnasional memiliki <i>power</i> yang lebih kuat dibandingkan negara. Dimana akhirnya aktor transnasional memiliki kesempatan yang lebih besar dalam mempengaruhi keputusan suatu pemerintahan. Biasanya aktor transnasional dalam hubungan ini lebih menggunakan pendekatan domestik, dimana mereka akan mendekati aspek domestik di negara tersebut, agar dapat melemahkan</p>

		pemerintah. Dengan hal tersebut, aktor transnasional berharap pemerintah dapat membuka forum diskusi mengenai kebijakan.
<b>BAB 3 (Aktor Transnasional)</b> <b>Halaman. 35-36</b>	Apa dasar dari pemilihan aktor-aktor dalam analisis aktor transnasional? Dan apa peran PBB dan IOM terhadap kebijakan Indonesia?	Dari penjelasan tersebut, sudah jelas bahwa pemilihan kedua aktor transnasional, yaitu PBB atau UNHCR dan IOM, adalah pilihan yang tepat. Hal ini didasari peran yang dimainkan kedua organisasi tersebut terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Pertama, PBB berhasil membuat Indonesia bergerak mengenai isu pengungsi Rohingya karena insiden penolakan pada tahun 2015. PBB meminta Indonesia untuk menerima kehadiran pengungsi Rohingya. Namun pemerintah Indonesia memahami betul kapasitas negaranya, yang dimana, Indonesia belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Maka dari itu, Indonesia dengan UNHCR dan IOM mengadakan forum negosiasi. Forum negosiasi ini berisikan syarat yang harus PBB dan IOM penuhi jika ingin Indonesia menerima dan bergerak terhadap isu pengungsi Rohingya.
<b>BAB 3 (Faktor Internal (Media))</b> <b>Halaman 40-41</b>	Pemakaian media Fimela	<b>Dihapus</b> dan diganti oleh:  Tidak hanya itu, terdapat media Indonesia yaitu Medcom.id, yang memaparkan informasi mulai dari akar konflik pengungsi Rohingya hingga pendapat atau opini yang diutarakan oleh masyarakat Indonesia di media sosial. Media ini menyediakan data berupa analisis mengenai opini masyarakat di

		<p>media sosial mengenai isu pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama terdapat doktor sains informatika yang mencoba memfilter atau mengkategorikan 10.218 status mengenai isu pengungsi Rohingya. Ternyata hasilnya cukup mengagetkan, karena terdapat 33% status yang diutarakan publik mengaitkan isu pengungsi Rohingya dengan pemerintah Indonesia. Namun hanya 18% yang mengaitkan isu tersebut dengan Aung San Suu Kyi. Maka dari itu, <i>Social Network Analysis</i> (SNA) menyatakan bahwa publik lebih berfokus pada mengaitkan pemerintah Indonesia dengan isu Rohingya. Hasil analisis tersebut tentunya terlihat aneh, karena munculnya isu pengungsi Rohingya adalah ulah dari pemerintah Myanmar, namun publik lebih mengaitkan isu tersebut dengan pemerintah Indonesia. Hal ini seakan-akan menggambarkan pemerintah Indonesia yang harus bertanggung jawab atas permasalahan isu pengungsi Rohingya.</p>
<p><b>BAB 4</b> (Kesimpulan) <b>Halaman 59</b></p>	<p>Seberapa besar peran domestik jika dibandingkan dengan peran eksternal?</p>	<p>Dari analisis pada bab 3, dapat dilihat bahwa faktor aktor transnasional memang menjadi pondasi atau alasan pertama pemerintah Indonesia untuk bergerak mengenai isu pengungsi Rohingya, namun banyaknya gerakan, dorongan, hingga kecaman yang diutarakan oleh masyarakat Indonesia membuat pemerintah Indonesia terus mengupayakan segala cara untuk meminimalisir hingga menghentikan konflik Rohingya. Terutama kecaman yang dirasakan oleh masyarakat beragama Budha di</p>

		Indonesia yang membuat pemerintah Indonesia lebih berusaha dalam menyelesaikan masalah isu pengungsi Rohingya di Indonesia dan pengungsi Rohingya secara luas.
--	--	--

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Octavanya Triverany  
NPM : 6091901141  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Analisis Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi  
Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Bantuan kepada  
Pengungsi Rohingya Tahun 2015-2018

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 5 Juni 2023



Octavanya Triverany

## ABSTRAK

Nama : Octavanya Triverany  
NPM : 6091901141  
Judul : Analisis Faktor Eksternal dan Faktor Internal yang Mempengaruhi Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Bantuan Kepada Pengungsi Rohingya Tahun 2015-2018

---

Pada tahun 2015, Indonesia didatangi kelompok pengungsi Rohingya. Kelompok pengungsi Rohingya tersebut datang ke Indonesia untuk mendapatkan bantuan. Namun kedatangannya ditolak oleh pihak TNI setempat karena kelompok pengungsi Rohingya tidak memiliki status maupun surat resmi yang menyatakan mereka adalah pengungsi legal. Tidak hanya itu, Indonesia sebenarnya dapat menolak kedatangan pengungsi Rohingya karena Indonesia tidak meratifikasi Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951. Perjanjian tersebut membuat Indonesia tidak bertanggung jawab atas keadaan serta situasi yang dialami oleh pengungsi Rohingya. Tetapi Indonesia mendapatkan kecaman dari berbagai arah mengenai penolakan tersebut dan membuat Indonesia menerima kedatangan pengungsi serta membantu pengungsi Rohingya secara luas. Dengan penjelasan tersebut, penulis menggunakan teori turunan dari kebijakan luar negeri, yaitu *external determinants and internal determinants*, untuk menjelaskan alasan mengapa Indonesia membantu pengungsi Rohingya walaupun Indonesia tidak meratifikasi Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951. Dari penelitian tersebut, penulis menemukan bahwa terdapat keterlibatan faktor eksternal dan faktor internal yang dapat mendorong Indonesia untuk melakukan berbagai upaya dan pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan isu pengungsi Rohingya. Upaya yang Indonesia lakukan dapat berupa kerjasama dengan aktor transnasional dan negara-negara yang terlibat. Tidak hanya itu, penulis juga menemukan bahwa terhadap penanganan yang pemerintah Indonesia lakukan di ranah domestik mengenai dampak dari penolakan kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia.

**Kata kunci** : Pengungsi Rohingya, Indonesia, Faktor eksternal, Faktor Internal

## ABSTRACT

Nama : Octavanya Triverany  
NPM : 6091901141  
Judul : Analysis of External Factors and Internal Factors Affecting the Indonesian Government in Providing Aid to Rohingya Refugees in 2015-2018

---

In 2015, Indonesia was visited by a group of Rohingya refugees. The Rohingya refugee group came to Indonesia to get help. However, their arrival was rejected by the local TNI because the Rohingya refugee group had no status or official letter stating that they were legal refugees. Not only that, Indonesia can actually reject the arrival of Rohingya refugees because Indonesia did not ratify the 1951 Refugee Convention Treaty. The treaty makes Indonesia not responsible for the circumstances and situations experienced by Rohingya refugees. However, Indonesia received criticism from various directions regarding the rejection and made Indonesia accept the arrival of refugees and help Rohingya refugees widely. With this explanation, the author uses the derivative theory of foreign policy, namely external determinants and internal determinants, to explain the reasons why Indonesia helped Rohingya refugees even though Indonesia did not ratify the 1951 Refugee Convention Agreement. From this research, the author found that there is an involvement of external factors and internal factors that can encourage Indonesia to make various efforts and approaches to solve the Rohingya refugee issue. The efforts that Indonesia makes can be in the form of cooperation with transnational actors and the countries involved. Not only that, the author also found that the handling that the Indonesian government did in the domestic sphere regarding the impact of the rejection of the arrival of Rohingya refugees in Indonesia.

**Keywords** : Rohingya Refugees, Indonesia, External Factors, Internal Factors

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur serta ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, penulis dapat berproses serta menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian Skripsi berjudul : “Analisis Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Bantuan kepada Pengungsi Rohingya Tahun 2015-2018”

Permasalahan pengungsi telah menjadi isu yang tak kunjung usai. Masyarakat etnis Rohingya telah menjadi korban kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia. Pengungsi Rohingya mendatangi beberapa negara termasuk Indonesia, untuk mendapatkan pertolongan. Namun, Indonesia menolak kedatangan pengungsi Rohingya karena Indonesia tidak meratifikasi Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Indonesia membantu pengungsi Rohingya walaupun tidak memiliki tanggungjawab atas pengungsi.

Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam tulisan ini. Penulis sangat terbuka terhadap kritik, saran, serta komentar yang dapat memperbaiki tulisan ini. Penulis juga berharap tulisan ini dapat memberikan kontribusi dan referensi bagi penelitian yang mendatang.

Bandung, 2 Juni 2023



Penulis



## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur serta terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan Skripsi ini dengan cara memberikan dukungan, doa, saran dan kritik. Sebelumnya, penulis memohon maaf dan pengertiannya jika terdapat beberapa pihak yang tidak dicantumkan namanya. Namun, perlu diketahui bahwa penulis sangat menghargai segala upaya kalian. Untuk itu, kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT, yang telah memberikan izin serta berkat kepada penulis agar dapat mengerjakan Skripsi ini dengan lancar. Tanpa kehadiran Allah SWT, penulis tidak bisa menjalankan hal-hal yang telah saya lakukan sedari awal masuk kuliah hingga pengerjaan Skripsi dengan lancar. Terimakasih Ya Allah, telah mendengar banyak sekali doa-doa serta keluhan yang penulis curahkan kepadamu. Terimakasih atas kehadiranMu yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
2. Papah, Dadang Herawan dan Mamah, Chaerita Puspawati, selaku orangtua penulis. Papah dan mamah yang menjadi alasan utama penulis menyelesaikan skripsi ini secepat mungkin. Terimakasih atas kehadiran, doa, dukungan, dan perhatian yang selalu kalian beri kepada penulis. Terimakasih juga telah menjadi pendengar yang baik dan sabar ketika penulis mengeluh ketika sedang berprogres. Penulis berharap papah sama mamah mendapatkan kesehatan selalu. Aa Meishal Pratama dan Aprian Dwiatama (Ian) sebagai Kaka laki-laki penulis. Terimakasih buat Aa dan

Ian yang selalu membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih juga karena selalu menghibur dikala stress mengerjakan skripsi ini.

3. Mba Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han) selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih banyak karena telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan bagi penulis selama pembuatan skripsi ini. Dengan bantuan dan dorongan Mba Vrames, penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
4. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D., selaku rektor Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku dekan FISIP Universitas Katolik Parahyangan, Mba Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., MA., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, seluruh dosen dan staf Studi Ilmu Hubungan Internasional, Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis dalam proses administrasi pengajuan skripsi hingga penulis bisa melaksanakan sidang.
5. Neneng, Dutte, Bebeb, dan Bulky sebagai kucing peliharaan penulis. Terima kasih karena selalu ada ketika penulis merasa jenuh dan kebingungan selama berproses. Terima kasih juga bagi Tini dan Wini, kucing yang matinya barengan, anak kucing yang selalu penulis bawa ke kamar buat jadi mainan. Walaupun tanggal matinya saat penulis sedang mengerjakan skripsi, tapi gapapa yang penting Tini Wini sudah ga sakit lagi.

6. Hitut Meong selaku grup sahabat SMA penulis. Tasya, Echa, Bina, Ayas, Armel, Dila, dan Dwi, terima kasih karena selalu ada ketika penulis sedang membutuhkan. Segala upaya hitmew yang selalu mengajak penulis bermain keluar serta membantu penulis dalam bentuk doa dan dukungan terhadap perkembangan skripsi ini. Terimakasih juga karena selalu bisa memberikan motivasi serta dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita semua bisa lulus dengan hasil yang memuaskan.
7. Tiara, Vanya, dan Jea selaku teman-teman pertama penulis di jurusan HI Unpar. Terima kasih sudah menjadi *support system* penulis dikala kuliah. Terima kasih juga telah menjadi teman yang dapat mendukung, membantu, dan mendengarkan keluh kesah selama mengerjakan penelitian ini. Tiara, teman yang entah kenapa selalu sekelas, terimakasih karena sudah membantu dan mendukung penulis dalam menempuh perkuliahan dari awal hingga akhir. Vanya dan Jea, teman seperjuangan dalam berproses skripsi, terimakasih karena selalu ada ketika penulis kebingungan dan buntu dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga kita semua bisa ketemu lagi ketika sudah sukses semua, Aamiin.
8. Teman-teman HI angkatan 2019. Terimakasih karena telah menjadi angkatan yang menyenangkan bagi penulis. Walaupun satu sama lain tidak begitu dekat, namun setiap individu HI 2019 selalu menerima dan dapat bekerjasama hingga menghasilkan lingkungan kuliah yang menyenangkan.
9. Terakhir, saya ingin berterima kasih dan mengapresiasi diri sendiri karena telah bertahan ketika berproses skripsi. Terimakasih karena telah melawan

penyakit malas yang selalu menempel di diri penulis. Terimakasih juga telah bertahan dan berjuang untuk menjalani kehidupan di Unpar. *You did well.*

Bandung, 2 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal line.

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	2
1.2.1 Pembatasan Masalah .....	4
1.2.2 Pertanyaan Penelitian .....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	5
1.4 Kajian Literatur .....	6
1.5 Kerangka Pemikiran .....	12
1.6 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	17
1.6.1 Metodologi Penelitian .....	17
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data .....	18
1.7 Sistematika Pembahasan .....	18

<b>BAB 2 TANGGAPAN INDONESIA MENGENAI PELANGGARAN HAM DI MYANMAR DAN KEDATANGANNYA KE INDONESIA .....</b>	<b>21</b>
2.1 Akar Pelanggaran HAM di Myanmar .....	21
2.2 Kedatangan Pengungsi Kelompok Rohingya di Indonesia .....	24
2.3 Tantangan Indonesia Untuk Menerima Kedatangan Kelompok Pengungsi Rohingya .....	26
2.4 Upaya Indonesia dalam Menyelesaikan Permasalahan Pengungsi Rohingya .....	27
<b>BAB 3 FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL DARI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP KEDATANGAN PENGUNGS ETNIS ROHINGYA KE INDONESIA .....</b>	<b>30</b>
3.1 Faktor Eksternal .....	30
3.1.1 Faktor Aktor Transnasional .....	31
3.2 Faktor Internal .....	36
3.2.1 Faktor Media .....	37
3.2.2 Faktor Opini Publik .....	42
3.2.3 Faktor Kelompok Kepentingan .....	45
3.2.4 Faktor Identitas .....	49
3.3 Hasil dari Faktor Eksternal dan Faktor Internal .....	52
<b>BAB 4 KESIMPULAN .....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>

## DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
FPI	: Federasi Persatuan Islam
HAM	: Hak Asasi Manusia
IHA	: Indonesia Humanitarian Alliance
IOM	: International Organization for Migration
NU	: Nahdlatul Ulama
NGO	: Non-Governmental Organization
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SNA	: Social Network Analysis
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UNHCR	: United Nation High Commission for Refugees

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kelompok etnis Rohingya adalah kelompok minoritas beragama muslim asal Myanmar. Walaupun tergolong kelompok minoritas, jumlah penduduk etnis Rohingya di Myanmar diperkirakan sekitar satu juta jiwa. Dipercaya juga bahwa Rohingya memiliki bahasa dan budaya yang berbeda dengan kelompok etnis lain di Myanmar. Tidak hanya itu, kelompok etnis Rohingya berkata bahwa mereka adalah keturunan orang Arab yang dahulu kala melakukan perdagangan.<sup>1</sup> Pada tahun 2017, kelompok etnis Rohingya diserang oleh kelompok militer Myanmar yang membuat Rohingya pergi menyelamatkan diri ke Bangladesh.<sup>2</sup> Penyerangan tersebut tentunya tidak terjadi secara tiba-tiba. Awal mula penyerangan tersebut diawali dengan sensus yang dibuat pemerintah pada tahun 2014,<sup>3</sup> dimana pemerintahan Myanmar hanya menerima delapan etnis dan etnis Rohingya tidak tercantum didalamnya. Ras-ras yang diakui adalah Bamar, Chin, Kachin, Kayin, Kayah, Mon, Rakhine dan Shan yang dibagi menjadi 135 kelompok etnis yang berbeda.<sup>4</sup> Di samping itu, Rohingya tidak termasuk dalam 135 kelompok etnis

---

<sup>1</sup> BBC, "Myanmar Rohingya: What You Need to Know about the Crisis," *BBC News*, January 23, 2020, Diakses pada 5 Oktober 2022, <https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561>.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Utpala Rahman, "The Rohingya Refugee: A Security Dilemma for Bangladesh," *Journal of Immigrant & Refugee Studies* 8, no. 2 (May 28, 2010): 233–39, Diakses pada 5 Oktober 2022, <https://doi.org/10.1080/15562941003792135>.



tersebut.<sup>5</sup> Hal tersebut yang membuat kelompok etnis Rohingya yang sudah tinggal ratusan tahun di Myanmar dianggap sebagai penduduk ilegal.

Menurut Médecins Sans Frontières (MSF), penyerangan tersebut telah memakan hingga 6.700 korban jiwa. Hal ini diperparah dengan banyaknya jumlah anak-anak yang menjadi korban. Konflik tersebut memakan hingga 730 jiwa anak yang diperkirakan berumur dibawah lima tahun.<sup>6</sup> Penyerangan militer Myanmar sudah tidak bisa dikategorikan sebagai penyerangan biasa, aksi tersebut biasa disebut dengan genosida atau *ethnic cleansing*. Penyerangan tersebut telah membuat murka banyak negara dan mengecam Myanmar terhadap aksi yang telah mereka lakukan. Hasil dari aksi genosida tersebut membuat ratusan ribu etnis Rohingya kabur dari Rakhrine ke Bangladesh. Menurut *The United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR), hingga saat ini terhitung sudah mencapai 900.000 jiwa yang mengungsi di Cox Bazar ,Bangladesh.<sup>7</sup> Tentu saja dengan banyaknya individu yang menetap di satu tempat membuat penyuluhan kebutuhan tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Karena hal tersebut, banyak pengungsi memilih untuk pergi ke tempat lain.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang telah Myanmar lakukan kepada kelompok etnis Rohingya menarik perhatian dunia. Banyak negara simpati

---

<sup>5</sup> Eleanor Albert and Lindsay Maizland, "What Forces Are Fueling Myanmar's Rohingya Crisis?," Council on Foreign Relations, January 23, 2020, Diakses pada 5 Oktober 2022., <https://www.cfr.org/backgrounder/rohingya-crisis..>

<sup>6</sup> BBC, "Myanmar Rohingya: What You Need to Know about the Crisis," *BBC News*, January 23, 2020, Diakses pada 5 Oktober 2022, <https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561>.

<sup>7</sup> UNHCR, "Rohingya Refugee Crisis Explained," [www.unrefugees.org](http://www.unrefugees.org), August 25, 2021, Diakses pada 6 Oktober 2022, <https://www.unrefugees.org/news/rohingya-refugee-crisis-explained/>.

dengan pelanggaran tersebut, termasuk Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian latar belakang, padatnya penampungan pengungsi di Cox Bazar, Bangladesh, membuat banyak pengungsi pergi mencari tempat lain, salah satunya Indonesia. Awalnya Indonesia menolak kedatangan kelompok etnis Rohingya. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan militer Indonesia yang menghadang kelompok etnis Rohingya karena dipandang sebagai ancaman.<sup>8</sup>

Penolakan yang dilakukan pihak militer Indonesia mungkin terlihat seperti aksi diskriminasi terhadap suatu kelompok yang rentan terhadap konflik, namun kelompok militer Indonesia tidak menolaknya tanpa alasan. Mereka menolak dengan alasan keamanan dan ditambah dengan posisi Indonesia yang tidak menandatangani Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951. Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951 adalah konvensi mengenai perlindungan terhadap pengungsi. Dimana setiap negara yang telah menandatangani persetujuan konvensi 1951, harus menerima kedatangan pengungsi dan bertugas untuk melindunginya di dalam negaranya.<sup>9</sup> Jika kita lihat sebelumnya, Indonesia juga menjadi negara kedatangan dari pengungsi asal Rohingya, namun Indonesia tidak menjadi negara penandatangan dari Perjanjian Konvensi 1951.<sup>10</sup> Hal tersebut menjelaskan bahwa seharusnya Indonesia tidak memiliki tanggung jawab atas kedatangan pengungsi.

Terlepas dari penolakan kedatangan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia. Indonesia tetap berusaha untuk memberikan kebutuhan seperti

---

<sup>8</sup> Deasy Silvy Sari, "Indonesia Government Policy on Rohingya Refugees," *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 7, no. 1 (June 22, 2018): 1, Diakses pada 6 Oktober 2022, <https://doi.org/10.25077/ajis.7.1.1-13.2018>.

<sup>9</sup> Paul Weis, "The Refugees Convention, 1951 the Travaux Preparatoires Analysed with Commentary," 1951, Diakses pada 23 Februari 2023, <https://www.unhcr.org/4ca34be29.pdf>.

<sup>10</sup> UNHCR, "UNHCR in Indonesia - UNHCR Indonesia," UNHCR (UNHCR, 2016), Diakses pada 23 Februari 2023, <https://www.unhcr.org/id/en/unhcr-in-indonesia>.

makanan, minuman, akses kesehatan, dan kebutuhan penting lainnya. Tidak hanya itu, Indonesia juga memberikan tempat tinggal sementara dan Masjid untuk melaksanakan ibadah.<sup>11</sup> Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia tidak semena-mena menolak kehadiran pengungsi Rohingya. Pemerintah Indonesia masih menjalankan tugasnya sebagai negara yang mengedepankan kemanusiaan dengan bantuan tersebut. Namun Indonesia tidak bisa terus bersikap setengah-setengah terhadap kedatangan pengungsi dikarenakan tekanan dan dorongan dari ranah domestik dan internasional. Tekanan dan dorongan ini membuat Indonesia seolah-olah perlu bertanggung jawab atas permasalahan isu pengungsi Rohingya. Maka dari itu, pemerintah Indonesia perlu mendiskusikan dan merancang kembali kebijakannya mengenai kedatangan pengungsi etnis Rohingya dan melakukan berbagai pendekatan untuk menyelesaikan isu pengungsi Rohingya secara luas.

### **1.2.1. Pembatasan Masalah**

Sejalan dengan bagian identifikasi masalah, penelitian ini akan dibatasi dengan analisis mengenai alasan Indonesia memilih untuk membantu pengungsi Rohingya asal Myanmar di Indonesia serta kelompok pengungsi Rohingya secara luas, sedangkan Indonesia tidak menandatangani Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951. Permasalahan tersebut akan berfokus pada masa kedatangan pengungsi Rohingya pada tahun 2015-2019. Tidak hanya itu, peneliti juga memfokuskan penelitian mengenai Indonesia yang merubah kebijakan luar negerinya terhadap kedatangan pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar walaupun tidak menjadi

---

<sup>11</sup> UNHCR, "UNHCR in Indonesia - UNHCR Indonesia," UNHCR (UNHCR, 2016), Diakses pada 23 Februari 2023, <https://www.unhcr.org/id/en/unhcr-in-indonesia>.

negara penandatangan Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951, yang dimana Indonesia tidak memiliki tanggung jawab atas kedatangan dan keadaan pengungsi.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Selaras dengan pemaparan diatas, maka peneliti akan merumuskan pernyataan penelitian seperti, **“Mengapa Indonesia memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya, sementara Indonesia bukanlah penandatangan dari Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951?”**.

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan terhadap kelompok pengungsi Rohingya di Indonesia dan pengungsi Rohingya secara luas. Ditambah lagi dengan peran Indonesia yang tidak menandatangani Perjanjian Konvensi Pengungsi tahun 1951, yang membuat Indonesia tidak memiliki tanggung jawab atas kedatangan dan keadaan pengungsi.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini, peneliti berharap dapat berkontribusi di bidang akademis dalam perkembangan studi ilmu hubungan internasional. Tidak hanya itu, peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor dan pengaruh Indonesia terhadap kasus kedatangan pengungsi Rohingya.

#### 1.4. Kajian Literatur

Aksi kemanusiaan tentu perlu dijunjung tinggi oleh semua aktor di dunia, terutama negara. Negara adalah salah satu aktor yang mampu memberantas permasalahan kemanusiaan, seperti halnya permasalahan pengungsi. Jika kita ambil dari kaca mata kemanusiaan, memang seharusnya kedatangan pengungsi tersebut dapat disambut dengan hangat, namun berbeda dengan Indonesia. Kedatangan pengungsi Rohingya asal Myanmar di Indonesia menuai pro dan kontra. Hal ini disebabkan karena Indonesia bukan negara yang menandatangani Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951. Kekosongan perjanjian tersebut sangat berdampak bagi pengungsi Rohingya dan juga Indonesia. Menurut Liliansa dan Jayadi, jika suatu negara seperti Indonesia tidak menandatangani Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951 tetapi menerima kedatangan pengungsi untuk masuk ke wilayahnya, maka hal itu tidak akan menyelesaikan masalah, namun akan memberikan masalah kepada pengungsi tersebut. Indonesia adalah negara transit yang tidak ingin menandatangani Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951, namun kerap menerima kedatangan pengungsi di wilayahnya. Hal ini dapat menghasilkan masalah seperti *over-capacity*, yang dapat melahirkan berbagai macam masalah di dalamnya. Contohnya nyata dari permasalahan tersebut adalah ketika terdapat penumpukan pada pusat penampungan pengungsi di Medan yang menghasilkan konflik dan memakan korban sebanyak delapan jiwa.<sup>12</sup> Keadaan *over-capacity* juga menandakan ketidaksiapan dan kurangnya fasilitas untuk menampung

---

<sup>12</sup> Dita Liliansa and Anbar Jayadi, "Should Indonesia Accede to the 1951 Refugee Convention and Its 1967 Protocol?," *Indonesia Law Review* 5, no. 3 (December 31, 2015): 324, Diakses pada 13 Maret 2023, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n3.161>. Hlm. 326.

pengungsi yang datang.<sup>13</sup> Masalah selanjutnya adalah ketika pengungsi datang ke negara transit seperti Indonesia namun tidak memiliki surat atau pernyataan bahwa mereka adalah pengungsi legal, maka mereka pun tidak dapat ditempatkan ke negara yang menerima pengungsi secara permanen.<sup>14</sup>

Indonesia menjadi negara transit adalah salah satu faktor yang mungkin dapat menjadi penolakan untuk menandatangani perjanjian pengungsi. Hal ini disebabkan dengan keadaan Indonesia sebagai negara transit dan masih mengalami kesulitan dalam membantu pengungsi atau pencari suaka di Indonesia. Menurut Suryastri dan Isnarti, terdapat kesulitan dan tantangan yang perlu Indonesia jalani sebagai negara transit. Tantangan yang akan merepotkan Indonesia dan pengungsi adalah panjangnya prosedur yang perlu dijalankan kedua belah pihak dan diperparah dengan kedatangan pengungsi dan pencari suaka yang terus bertambah setiap tahunnya.<sup>15</sup> Selanjutnya, negara transit dapat menghasilkan *over-capacity*. Keadaan tersebut terjadi karena kedatangan pengungsi secara terus menerus dan harus menjalankan prosedur yang memakan banyak waktu.<sup>16</sup> Maka dari itu, *over-capacity* dapat menghasilkan konflik seperti yang disebutkan oleh Liliansa sebelumnya.

Tantangan yang terakhir menurut Suryastri adalah mengenai hak-hak manusia seperti mendapatkan pendidikan, perekonomian, dan juga pekerjaan.

---

<sup>13</sup> Dita Liliansa and Anbar Jayadi, "Should Indonesia Accede to the 1951 Refugee Convention and Its 1967 Protocol?," *Indonesia Law Review* 5, no. 3 (December 31, 2015): 332, Diakses pada 13 Maret 2023, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n3.161>.

<sup>14</sup> Ibid, Hlm. 328

<sup>15</sup> Cifebrima Suyastri, Rika Isnarti, and Rendi Prayuda, "The Challenges of Indonesia as a 'Quintessential Transit Country' for Refugees: Cases of Refugees in City of Pekanbaru," *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 3, no. 2 (December 30, 2020): 149–64, Diakses pada 13 Maret 2023, <https://doi.org/10.33822/mjih.v3i2.2162>. Hlm. 160.

<sup>16</sup> Ibid. Hlm. 160-161

Indonesia masih belum bisa memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh pengungsi. Suryastri juga mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki program pendidikan bagi anak-anak di pengungsian, namun minim akan regulasi untuk mempertahankan program tersebut.<sup>17</sup> Permasalahan tersebut serupa dengan artikel mengenai kesulitan pengungsi mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Luthvi menjelaskan bahwa kesulitan yang dirasakan oleh pengungsi diakibatkan oleh regulasi tahun 2016 mengenai penanganan imigran ilegal yang mengaku sebagai pengungsi atau pencari suaka. Regulasi ini menjelaskan bahwa pengungsi tidak diizinkan untuk mencari pekerjaan dan melaksanakan aktivitas yang memiliki hubungan dengan pendapatan.<sup>18</sup> Regulasi ini dibuat tidak semena-mena untuk merugikan pengungsi yang datang, namun Indonesia masih memiliki permasalahan pekerjaan di kalangan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan yang diperoleh pekerja Indonesia dan pemerintah Indonesia tidak ingin lapangan pekerjaan yang seharusnya milik masyarakat Indonesia, namun direbut oleh pengungsi yang notabennya orang luar.<sup>19</sup> Selain hal tersebut, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia tidak menandatangani Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951, yang tidak mewajibkan Indonesia untuk memberikan pengungsi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Cifebrima Suyastri, Rika Isnarti, and Rendi Prayuda, "The Challenges of Indonesia as a 'Quintessential Transit Country' for Refugees: Cases of Refugees in City of Pekanbaru," *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 3, no. 2 (December 30, 2020): 149–64, Diakses pada 13 Maret 2023, <https://doi.org/10.33822/mjih.v3i2.2162>. Hlm. 160.

<sup>18</sup> Luthvi Nola, "Refugee Employment Prohibition in Indonesia," *Proceedings of the 3rd International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2020, July 1st 2020, Semarang, Indonesia*, 2021, Diakses pada 13 Maret 2023, <https://doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303641>. Hlm. 4.

<sup>19</sup> Ibid. Hlm. 3

<sup>20</sup> Ibid. Hlm. 4

Berbeda dari pemikiran-pemikiran sebelumnya, menurut Dian dan Rahmat, Indonesia perlu membantu serta menerima kedatangan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh peran Indonesia di kancah internasional yang selalu menjunjung tinggi aksi kemanusiaan. Jika Indonesia tidak menerima kedatangan pengungsi di perbatasan negaranya, maka Indonesia dipandang sebagai pengkhianat terhadap sikap dan ujarannya sendiri. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki hukum dan regulasi yang mendasari kemanusiaan seperti Peraturan Presiden (Perpres) nomor 125, tahun 2016 mengenai penanganan terhadap pengungsi dari luar. Kehadiran regulasi ini memperlihatkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi di negaranya. Regulasi ini dibantu oleh kerjasama antara pemerintah dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), saat terjadi aksi penolakan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia pada tahun 2015. Karena hal ini, pengungsi Rohingya dapat transit dan memasuki kawasan Indonesia. Keberadaan regulasi ini juga menunjukkan peran utama Indonesia yaitu menjaga keamanan dan kedamaian di kawasan Internasional.<sup>21</sup> Namun regulasi ini tidak akan bekerja secara efektif jika Indonesia tidak menyelesaikan permasalahan kemanusiaan di Myanmar. Maka dari itu, menurut Rizka, Indonesia mengajak negara tetangga yang memiliki permasalahan serupa dengan Indonesia, yaitu menjadi negara kedatangan pengungsi Rohingya, untuk melakukan pertemuan. Pertemuan ini membicarakan permasalahan pengungsi yang terombang-ambing di tengah laut. Tidak hanya itu,

---

<sup>21</sup> Dian Wahyu Utami, Rahmat Saleh, and Irin Oktafiani, "Indonesia's Constitutional Immigration Policy: A Case of Rohingya Ethnic Group Refugees," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 8, no. 2 (December 28, 2018): 119–32, Diakses pada 14 Maret 2023, <https://doi.org/10.14203/jissh.v8i2.84>. Hlm. 125.



Indonesia juga menjadi salah satu aktor penting dalam diplomasi untuk penyelesaian permasalahan di Myanmar dengan Bangladesh.<sup>22</sup>

Aksi kemanusiaan yang kerap dijunjung tinggi oleh Indonesia terhadap permasalahan Rohingya, tidak semena-mena tanpa pemicu. Menurut Deasy dan Taufik, Indonesia kerap mendapatkan tekanan dari Organisasi Internasional, *Non-Governmental Organization* (NGO), dan masyarakatnya sendiri. Paksaan serta dorongan ini terjadi militer Indonesia menolak kedatangan pengungsi Rohingya di laut Aceh.<sup>23</sup> Penerimaan pengungsi Rohingya di Indonesia diawali dari aksi nelayan Aceh yang membawa pengungsi ke daratan. Hal ini juga didukung oleh NGO nasional maupun transnasional yang akhirnya membuat Indonesia menerima kedatangan pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di lautan. Masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia karena ajakan nelayan membuat pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan mengenai menerima atau menolak pengungsi Rohingya tersebut. Serupa dengan penjelasan dari Dian dan Rahmat sebelumnya, alangkah lebih baik, Indonesia membuat kebijakan mengenai kedatangan pengungsi Rohingya berdasarkan aksi kemanusiaan.<sup>24</sup> Hal ini diperkuat dengan penolakan Indonesia terhadap pengaplikasian Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951.

---

<sup>22</sup> Raden Ajeng Rizka Fiani Prabaningtyas, "Indonesia and the International Refugee Crisis: The Politics of Refugee Protection," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 9, no. 2 (December 31, 2019): 131–46, Diakses pada 14 Maret 2023, <https://doi.org/10.14203/jjssh.v9i2.152>. Hlm. 139.

<sup>23</sup> Deasy Silvy Sari, "Indonesian Government Policy on Rohingya Refugees," *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 7, no. 1 (June 22, 2018): 1, Diakses pada 14 Maret 2023, <https://doi.org/10.25077/ajis.7.1.1-13.2018>. Hlm. 5.

<sup>24</sup> Ibid. Hlm. 6

Dari pernyataan berbagai pihak mengenai kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia terdapat dua arah, yaitu pro (setuju) dan kontra (tidak setuju). Pada tiga pernyataan pertama, terlihat bahwa mereka ragu atau kurang yakin dengan kemampuan Indonesia jika Indonesia ingin menerima kedatangan pengungsi Rohingya tanpa status yang jelas, yaitu tanpa status sebagai penandatangan Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951. Mereka percaya, jika Indonesia menerima pengungsi tanpa perjanjian tersebut, maka tidak hanya pengungsi saja, namun Indonesia pun akan merasakan kerugiannya. Untuk mencegah kerugian tersebut, alangkah lebih baik Indonesia tidak menerima kedatangan pengungsi jika tidak ingin menandatangani perjanjian tersebut. Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa alangkah lebih baik Indonesia menerima kedatangan pengungsi walaupun tidak menjadi negara penandatangan perjanjian 1951. Pihak yang percaya hal ini, menganggap bahwa Indonesia harus menolong pengungsi atas dasar kemanusiaan. Mengingat keterlibatan Indonesia di lingkup internasional yang selalu menjunjung tinggi aksi kemanusiaan di dunia.

Sebagai peneliti dalam penelitian ini, penulis perlu memposisikan diri mengenai kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia. Peneliti berpikir bahwa melakukan aksi kemanusiaan dengan menerima kedatangan pengungsi adalah hal yang tepat. Terutama peneliti juga setuju dengan keterlibatan Indonesia mengenai konflik di Myanmar, dimana Indonesia paham bahwa permasalahan pengungsi tidak akan selesai jika akar dari permasalahan tidak diselesaikan terlebih dahulu. Penulis juga percaya bahwa Indonesia tetap memerlukan bantuan dari luar, yaitu

bantuan organisasi internasional seperti PBB mengenai pendanaan. Hal tersebut dapat dilakukan karena Indonesia adalah negara transit yang masih memiliki kekurangan dalam negaranya, yang dimana Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan pengungsi secara terus-menerus. Maka dari itu, peneliti berpikir bahwa pemikiran dan pernyataan mengenai penerimaan kedatangan pengungsi Rohingya atas dasar aksi kemanusiaan adalah hal yang benar.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Negara adalah aktor penting dalam ilmu hubungan internasional. Seluruh negara tentu memiliki tujuan maupun kepentingannya masing-masing. Terdapat beberapa cara untuk mencapai kepentingan tersebut, salah satunya seperti membuat kebijakan luar negeri yang mampu mendukung negara dalam meraih kepentingan tersebut. Menurut Christopher Hill dalam buku “Foreign Policy in the Twenty-First Century”, kebijakan luar negeri atau biasa dikenal *foreign policy* adalah upaya suatu aktor independen untuk melakukan hubungan eksternal resmi di kalangan internasional dan dapat mempengaruhi perilaku aktor lainnya.<sup>25</sup> Selain itu, kebijakan luar negeri juga dapat didefinisikan sebagai cara untuk menyatukan suatu komunitas dengan komunitas atau aktor independen lainnya. Hal ini dikarenakan aktor dalam lingkup internasional tidak sama atau homogen yang akhirnya memerlukan keberadaan kebijakan luar negeri untuk menyatukan komunitas yang terpisah.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Christopher Hill, *Foreign Policy in the Twenty-First Century* (London: Palgrave, 2016), Diakses pada 15 Maret 2023. Hlm.4-5.

<sup>26</sup> Ibid. Hlm. 4-5

Menurut Hill, variabel penting dalam kebijakan luar negeri adalah adanya faktor internal dan juga eksternal.<sup>27</sup> Variabel tersebut dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu aktor. Faktor eksternal atau disebut *external determinant* adalah faktor luar yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Hill mengatakan bahwa ketika suatu negara kuat dalam ranah domestik, maka akan ada kemungkinan dimana negara tersebut dapat mempengaruhi bahkan mendominasi ranah luar atau internasional.<sup>28</sup> Faktor yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan suatu negara adalah aktor transnasional. Aktor transnasional adalah aktor yang merupakan individu maupun kelompok lintas batas dan dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Walaupun aktor tersebut dapat mempengaruhi kebijakan negara lain, aktor transnasional tidak bisa dikontrol oleh suatu sistem pemerintah suatu negara.<sup>29</sup> Aktor transnasional dapat berupa organisasi atau kelompok yang berada di ranah internasional. Sebagaimana PBB serta *World Bank* (WB) dapat mempengaruhi kebijakan maupun sikap antar negara.

Hill memaparkan bahwa terdapat tiga hubungan antara aktor transnasional dengan negara, yaitu, *normal*, *competitive*, dan *parallel*. Dalam penelitian ini, hubungan yang terlihat antara transnasional aktor dengan negara adalah hubungan *competitive*. Hubungan tersebut menjelaskan bahwa aktor transnasional memiliki *power* yang lebih kuat dibandingkan negara. Dimana akhirnya aktor transnasional memiliki kesempatan yang lebih besar dalam mempengaruhi keputusan suatu

---

<sup>27</sup> Christopher Hill, *Foreign Policy in the Twenty-First Century* (London: Palgrave, 2016), Diakses pada 15 Maret 2023. Hlm.4-5.

<sup>28</sup> Ibid. Hlm. 199.

<sup>29</sup> Ibid. Hlm. 200

pemerintahan. Biasanya aktor transnasional dalam hubungan ini lebih menggunakan pendekatan domestik, dimana mereka akan mendekati aspek domestik di negara tersebut, agar dapat melemahkan pemerintah. Dengan hal tersebut, aktor transnasional berharap pemerintah dapat membuka forum diskusi mengenai kebijakan.<sup>30</sup>

Faktor internal atau dapat disebut *internal determinant* adalah faktor dalam atau domestik yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Terdapat beberapa faktor dalam *internal determinant*. Pertama faktor opini publik atau masyarakat. Menurut Hill, faktor opini publik adalah elemen yang dapat dipakai oleh masyarakat luas untuk mengontrol politikus dalam mengambil kebijakan.<sup>31</sup> Namun opini yang diutarakan publik, tidak semana-mena akan diterima bahkan dianggap oleh pemerintah. Seperti bagaimana opini publik terhadap kebijakan atau gerak-gerik pemerintah yang terpendang tidak berbasis atau tidak memiliki ilmu politik didalamnya.<sup>32</sup> Hal tersebutlah yang membuat pemerintah perlu memilah opini yang dilontarkan publik ke mereka. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan antara *mass opinion* dan *attentive opinion*. Kedua hal tersebut dibedakan dari bagaimana individu maupun kelompok mengutarakan isu yang sedang diperbincangkan.<sup>33</sup> Namun pernyataan tersebut tidak memudahkan pengaruh opini terhadap kebijakan suatu aktor atau negara. Menurut Hill, opini yang bersifat kontra dengan suatu kebijakan, biasanya berasal dari komunitas minor, yang dimana mereka adalah kelompok yang bisa saja merasakan dampak

---

<sup>30</sup> Christopher Hill, *Foreign Policy in the Twenty-First Century* (London: Palgrave, 2016), Diakses pada 15 Maret 2023. Hlm. 217

<sup>31</sup> Ibid. Hlm. 270. Diakses pada 16 Mei 2023.

<sup>32</sup> Ibid. Hlm. 270-272

<sup>33</sup> Ibid. Hlm. 270.

negatif dari kebijakan.<sup>34</sup> Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan opini publik tetaplah penting dan dapat berdampak bagi keberlangsungan pembuatan kebijakan suatu negara, namun tidak dipungkiri bahwa pemerintah atau aktor perlu memilah opini mana yang perlu ditanggapi dan tidak.<sup>35</sup> Faktor internal kedua dapat berupa grup yang berkepentingan (*interest groups*). Faktor ini berhubungan dengan faktor sebelumnya, yaitu opini publik. Keterkaitan ini ada karena kelompok kepentingan dapat berperan aktif dalam menyampaikan opini publik. Semakin kuat pengaruh kelompok tersebut, maka semakin kuat juga pergerakan opini publiknya, yang akhirnya dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Maka dari itu, Hill percaya bahwa dengan adanya keberadaan suatu grup yang berkepentingan, dapat mendorong dampak lebih besar mengenai opini publik.<sup>36</sup> Merekalah aktor yang kerap menyuarakan suara yang bisa saja tidak terdengar oleh pemerintah. Namun perlu diketahui bahwa terdapat dua sikap kelompok dalam pembahasan ini, yaitu kelompok yang meraih kepentingan dengan cara halus dan kelompok yang meraih kepentingan dengan menekan atau mengancam suatu aktor.<sup>37</sup> Walaupun kedua kelompok tersebut terlihat berbeda, namun mereka memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merubah suatu kebijakan.

Faktor selanjutnya adalah faktor media. Media adalah alat yang seringkali digunakan individu maupun kelompok untuk menyuarakan permasalahan yang terjadi. Peran media dalam proses pembuatan kebijakan adalah untuk menjadi

---

<sup>34</sup> Christopher Hill, *Foreign Policy in the Twenty-First Century* (London: Palgrave, 2016), Diakses pada 15 Maret 2023. Hlm. 274

<sup>35</sup> Ibid. Hlm. 276

<sup>36</sup> Ibid. Hlm. 277.

<sup>37</sup> Ibid. Hlm. 277

wadah yang memberikan ruang komunikasi bagi pembuat kebijakan dan masyarakat publik.<sup>38</sup> Peran media juga berhubungan dengan faktor-faktor sebelumnya, karena media dapat mempengaruhi opini publik mengenai suatu permasalahan, terlebih lagi, media seringkali dianggap sebagai telinga dan mata di pemerintahan.<sup>39</sup> Hill juga menjelaskan bahwa media tidak selalu diposisi masyarakat atau oposisi pemerintah, namun media dapat menjadi peran penting bagi pemerintah untuk menyebarkan suatu propaganda.<sup>40</sup> Secara sederhana, media memiliki kapasitas untuk mempengaruhi suatu argumen politik dengan menyediakan wadah debat.<sup>41</sup> Faktor selanjutnya mengenai Identitas. Faktor ini meliputi dua hal seperti keberagaman (*diversity*) dan identitas (*identity*). Keberagaman dapat terjadi ketika kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda (identitas) pergi ke suatu tempat yang sama, untuk mencapai sesuatu, dan berkumpul di satu tempat. Hal ini bisa dikatakan sebagai '*multiculturalism*' atau *ethnocultural diversity*.<sup>42</sup> Dengan adanya berbagai macam latar belakang di satu tempat yang sama, pembuat kebijakan harus lebih hati-hati dalam membuat kebijakan. Hal tersebut dapat terjadi karena pembuat kebijakan tidak hanya melihat masyarakat aslinya saja, namun mereka harus memperhatikan kepentingan dan nilai dari masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda dari masyarakat asli.<sup>43</sup> Penjelasan tersebut memiliki kesamaan dengan faktor pertama, yaitu opini publik, dimana kemungkinan aksi protes atau sikap tidak

---

<sup>38</sup> Christopher Hill, *Foreign Policy in the Twenty-First Century* (London: Palgrave, 2016), Diakses pada 15 Maret 2023. Hlm. 284.

<sup>39</sup> Ibid. Hlm. 282

<sup>40</sup> Ibid. Hlm. 285

<sup>41</sup> Ibid. Hlm. 284

<sup>42</sup> Ibid. Hlm. 287

<sup>43</sup> Ibid.

setuju datang dari kelompok minoritas. Ketika pemerintah atau pembuat kebijakan tidak memikirkan kelompok minoritas tersebut, permasalahan hanya akan datang terus-menerus.

## **1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1. Metode Penelitian**

Diperlukan metode penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Peneliti memilih untuk menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang mengajak peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami suatu isu atau permasalahan yang menjadi bahan pembahasan. Dimana peneliti mengandalkan data atau hasil harafiah untuk mendapatkan pemahaman baru terhadap permasalahan.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, peneliti dapat melakukan analisis dan memberikan penjelasan serta argumen mengenai topik penelitian dengan menggunakan berbagai data yang menjelaskan fenomena secara mendetail. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat menganalisis dan memahami permasalahan penelitian secara menyeluruh. Peneliti akan mengumpulkan data dari penelitian berbasis dokumen dan juga penelitian berbasis internet. Data yang peneliti gunakan dapat berupa jurnal, buku, serta data dari *website* resmi.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (London: Sage Publications Ltd, 2014). Diakses pada 10 April 2023.

<sup>45</sup> Ibid. Hlm 239



### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Selaras dengan metode yang peneliti pakai dalam penelitian, yaitu metode kualitatif. Peneliti akan memakai metode kualitatif dengan karakteristik *multiple sources of data*. Dimana peneliti akan mengumpulkan berbagai macam data dengan topik pembicaraan yang sama untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>46</sup> Hal ini dilakukan agar analisis penelitian dapat terbentuk dari berbagai perspektif, yang dimana tidak dapat dilakukan jika hanya memakai satu data. Peneliti akan memakai data berupa data berbasis internet. Maka dari itu, teknik pengumpulan data penelitian ini akan berbasis oleh data literatur seperti buku, jurnal, dan artikel dari *website* resmi yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain literasi tersebut, penelitian ini juga akan mengambil data berupa laporan resmi negara maupun organisasi dan informasi-informasi dari *website* resmi.

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti akan menyertakan lima bab yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Pada Bab 1 yang berjudul “pendahuluan” akan berfokus pada penjelasan latar belakang dan anomali dari topik yang akan diteliti, yaitu sikap Indonesia terhadap pengungsi Rohingya walaupun tidak menjadi negara penandatangan Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951 yang dilanjut dengan pembatasan masalah. Selanjutnya peneliti juga memaparkan rumusan masalah seperti **“Mengapa Indonesia memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya, sementara Indonesia bukanlah penandatangan dari Konvensi Pengungsi 1951?”** yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Dilanjut dengan

---

<sup>46</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (London: Sage Publications Ltd, 2014). Diakses pada 10 April 2023. Hlm.234.

pemaparan tujuan dan kegunaan penelitian. Penelitian ini memaparkan kajian literatur yang sesuai dengan analisis penelitian dan kerangka pemikiran yang akan memandu alur pemikiran selama menganalisis topik. Bab ini akan ditutup dengan pemilihan metode penelitian, teknis pengambilan data, dan sistematika pembahasan yang akan menjelaskan penelitian secara rinci.

Bab 2 yang berjudul “Tanggapan Indonesia Mengenai pelanggaran HAM di Myanmar dan Kedatangannya ke Indonesia”. Bagian ini akan membahas mengenai runtutan kejadian terjadinya konflik yang menghasilkan pelanggaran HAM terhadap kelompok etnis Rohingya. Dilanjut dengan tanggapan Indonesia sebagai negara yang menjunjung kemanusiaan terhadap kejadian yang dirasakan kelompok etnis Rohingya. Bab ini juga akan membahas kedatangan pengungsi etnis Rohingya di laut Indonesia dan tanggapan awal Indonesia terhadap pengungsi Rohingya.

Bab 3 adalah bagian analisis dari penelitian ini dan akan berjudul “Faktor Eksternal dan Internal dari Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Kedatangan Pengungsi Etnis Rohingya ke Indonesia”. Bagian ini akan menganalisis dorongan dari faktor eksternal dan internal dalam pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia mengenai aksi Indonesia terhadap isu pengungsi Rohingya. Dalam bagian ini, peneliti akan berfokus pada pengaplikasian kerangka teori terhadap topik penelitian.

Bab 4 merupakan bagian terakhir dalam penelitian, dimana kesimpulan akan dipaparkan. Kesimpulan akan berisi penekanan atau penegasan ulang mengenai posisi dan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dicantumkan

pada Bab 1, yaitu “**Mengapa Indonesia memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya, sementara Indonesia bukanlah penandatangan dari Konvensi Pengungsi 1951?**”, yang akan berfokus pada konsep *External and Internal Determinants*, dalam teori kebijakan luar negeri.